

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya pemerintahan ialah dalam rangka melindungi masyarakat, oleh karenanya masyarakat memberi amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan berbagai fungsi yaitu mulai dari fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Sehingga terkait dengan pelaksanaan fungsi itu pemerintah berupaya melakukan program-program melaksanakan kegiatan-kegiatan salah satunya ialah pemberdayaan.

Fungsi pemerintah dibidang pemberdayaan, salah satu tugas pokok pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat dengan demikian, perangkat daerah senantiasa mengambil peran yang besar di dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayahnya. Hal pemberdayaan masyarakat tersebut tidak terlepas dari ide Griffin yang mengatakan, bahwa persoalan (dan urgensi) kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan, dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintah ditingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga dilandaskan pada pemikiran *community based resource management* (pengelolaan sumber daya local), yang merupakan suatu sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan

kurangnya partisipasi masyarakat didalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan *people centered development* (pembangunan yang berorientasi pada manusia) yang menekankan pada teknologi *social learning* (pembelajaran social) dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (*empowerment*).

Pemberdayaan nelayan adalah salah satu konsep di dalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumberdaya manusia atau kualitas perekonomian. Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat di sandingkan dengan masyarakat di sektor lain, seperti sector pertanian, sektot perindustrian dan lain-lain. Upaya pemberdayaan sangat di perlukan dalam mendongkrak persoalan-persoalan yang ada di masarakat pesisir (nelayan) sebagai upaya meningkatkan kehidupan mereka dan dapat di sandingkan dengan sector perekonomian yang lain.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat nelayan yang ada di Natuna yaitu melalui (renstra) Rencana setrategis pembangunan dinas perikanan Kabupaten Natuna merupakan kerangka acuan (*guard line*) kebijakan, indicator program dan kegiatan yang akan di laksanakan merupakan gambaran dan jawaban dari sector kelautan dan perikanan itu sendiri.

Untuk wilayah Natuna sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sector perikanan,meningkatkan tarap hidup nelayan dan meningkatnya kualitas birokrasi pemerintah, pemerintah daerah melali dinas kelautan perikanan

natuna dalam surat keputusan kepala dinas perikanan kabupaten Natuna nomor 19 tahun 2018 tentang penetapan indicator kinerja utama dinas perikanan kabupaten natuna merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan bidang perikanan. Yang berfungsi perumusan kebijakan teknis bidang perikanan, penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan dari hulu sampai hilir, penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan dalam batas wewenang daerah. (Dinas kelautan perikanan)

Kegiatan perikanan di Kabupaten Natuna didominasi oleh usaha penangkapan ikan. Pada tahun 2015, tercatat produksi perikanan tangkap mencapai 48.698,84 ton sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 754,84 ton. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap tahun 2015 terhadap 2014 mencapai 2,87%. Sedangkan pertumbuhan produksi perikanan budidaya pada periode waktu yang sama mengalami penurunan sebesar 69,55%. Hal ini disebabkan pembudidaya mengalami kesulitan dalam mencapai pasca pasar bagi produk perikanan budidaya yang dihasilkan. (*Pusat Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan*)

Dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat yang berada di pesisir pantai, Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) yaitu berupa bantuan kapal dan alat tangkap.

Dinas Kelautan dan Perikanan sangat berperan penting dalam menentukan nasib para nelayan yang ada di Kabupaten Natuna, karena semakin berjalannya

waktu akan banyak perubahan dalam segi alat tangkap dan kapal-kapal besar dan modern yang masuk untuk mengambil ikan di laut Natuna. Maka dari itu, melalui UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal baik oleh dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang di arahkan pada usaha mikro kecil menengah dan koperasi.

Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) seperti: alat tangkap, kapal tangkap ikan, bubu, dan teknologi penangkapan ikan kepada nelayan, dikarenakan potensi sumber daya kelautan Kabupaten Natuna sangat besar. Harapannya nelayan dapat memanfaatkan kekayaan alam laut Natuna dengan optimal.

Namun sayangnya kekayaan bawah laut dimanfaatkan nelayan asing yang kerap menjadikan perairan Natuna sebagai target penangkapan ikan mereka. Banyak juga nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal tanpa surat dan dokumen. Dengan bantuan alat tangkap diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkap nelayan.

Selain bantuan diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada tanggal 2 juni 2017 juga telah memberikan bantuan berupa sejumlah kapal di peruntukkan nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB).(*Dinas Perikanan Natuna*)

Namun, bantuan tersebut belum bisa membuat nelayan menggunakan alat tangkap yang diberikan oleh Pemerintah, karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa kapal,dan kapal tersebut tidak layak dioperasikan di laut

Natuna. Sehingga membuat kapal bantuan tersebut tidak memberikan perubahan kepada peningkatan hasil tangkap nelayan tradisional.

Desa Cemaga Tengah adalah salah satu desa pesisir yang ada di Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, yang juga termasuk dalam daftar pemberian bantuan tersebut, Masyarakat nelayan Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna memiliki ketergantungan terhadap kondisi sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Melalui berbagai usaha penangkapan tentulah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di daerah tersebut sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah berupa sarana prasarana guna untuk memaksimalkan hasil tangkapan nelayan.

Namun pada kenyataannya di lapangan, bantuan yang di berikan oleh kementerian kelautan perikanan (KKP) melalui dinas perikanan kabupaten Natuna belum bias memberrikan dampak yang baik bagi penunjang kegiatan penangkapan iakan nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha Bersama (KUB) yang ada di desa cemaga tengah kecamatan bunguran selatan kabupaten Natuna.

Selama berjalannya program ini banyak fenomena yang terjadi di lapangan yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu.

1. Bantuan kapal yang di berikan pemerintah pusat (KKP) tahun 2017 tidak bisa di operasikan di Natuna.
2. Bantuan kapalnya tidak cocok untuk di operasikan di Natuna

Untuk itu diperlukan sekali peran pemerintah terutama pemerintah kabupaten Natuna untuk melakukan pemberdayaan ini, mengingat salah satu

fungsi pemerintah adalah pemberdayaan, dengan adanya fungsi pemberdayaan dari pemerintah tentu hal ini memberi harapan agar pemerintah bisa menjalankan fungsi pemberdayaan sebaik mungkin.

Namun dalam pemberdayaan terhadap nelayan ini terlihat masih minim atau terbatasnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Dalam upaya pemberdayaan ini yang terlihat hanya bantuan perlengkapan yang di berikan kepada kelompok nelayan dan bantuan yang di berikan cukup banyak yang tidak bisa dioperasikan karena bantuan yang sampai pada kelompok usaha Bersama (KUB) tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan yang ada di Natuna.

Atas dasar fakta yang tersebut diatas, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap bantuan yang di berikan oleh pemerintah kementerian kelautan perikanan (KKP) melalui Dinas Kelautan Perikanan untuk kelompok nelayan Natuna, karena salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan alat penangkapan ikan yaitu persepsi kelompok nelayan yang menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan nelayan atau tidak.

Program bantuan alat penangkapan ikan dianggap berhasil apabila persepsi penerima bantuan sesuai dengan kebutuhan atau nelayan mempersepsikan penerimaan bantuan tersebut baik maka diharapkan program bantuan alat tangkap ikan tersebut akan berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Sebaliknya apabila persepsi nelayan yang menerima bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kurang baik, maka program bantuan alat penangkapan

ikan tersebut dapat dikatakan tidak berhasil atau gagal, sehingga program bantuan alat penangkapan ikan tersebut dapat dilakukan penghentian

Melihat permasalahan yang ada diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Pemberdayaan Nelayan Natuna Tahun 2017. (Studi kasus pada kelompok nelayan tangkap desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini ”Bagaimana keberhasilan program pemberdayaan terhadap kelompok nelayan tangkap didesa Cemaga Tengah Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2017” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi program pemberdayaan terhadap kelompok nelayan tangkap di Desa Cemaga Tengah Bunguran Selatan Kabupaten Natuna.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai dampak Program Pemberdayaan kelompok Nelayan tangkap Desa Cemaga Tengah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok nelayan tangkap, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi barometer untuk mengukur dari hasil kegiatan program pemberdayaan yang telah dilakukan.

